

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN, IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV, proses implementasi Program Sengkuyung oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang berbeda-beda pada setiap dimensi. Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan serta sumber daya, implementasi berjalan cukup baik: program memiliki landasan regulasi yang jelas, dan BAPENDA berhasil melakukan perbaikan signifikan dari sistem manual (Sengkuyung *Prototype* 2024) menjadi sistem digital (Sengkuyung.id 2025) untuk mengatasi kendala pencetakan dokumen dan keterbatasan petugas yang sebelumnya menghambat pelaksanaan.

Namun, pada dimensi komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana di tingkat wilayah, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan, implementasi masih menghadapi kendala mendasar. Temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa ketiga informan di luar BAPENDA (RT, WP1, WP2) secara konsisten belum pernah mendengar nama program Sengkuyung sama sekali, meski program telah berjalan sejak akhir 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang merancang kolaborasi berjenjang dari provinsi hingga RT/RW dengan realisasinya di lapangan, setidaknya pada lokasi yang diteliti. Kesenjangan ini diperkuat oleh kondisi sosial-ekonomi wajib pajak (keterbatasan ekonomi, beban kenaikan Opsen PKB, ketidakpercayaan terhadap

komunikasi promosi BAPENDA) serta sikap skeptis calon pelaksana di tingkat RT terhadap efektivitas pelibatan mereka dalam urusan yang dianggap bersifat pribadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Sengkuyung telah menunjukkan kemajuan yang baik dari sisi perbaikan internal BAPENDA, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh masih dibatasi oleh jangkauan sosialisasi dan komunikasi kebijakan yang belum merata sampai ke unit pemerintahan terkecil dan masyarakat sasaran.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan secara terbuka. Pertama, jumlah informan terbatas pada satu orang per kategori, sehingga representasi temuan, khususnya dari sisi RT/RW dan wajib pajak, belum mencakup variasi karakteristik di seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kedua, data dari informan RT bersifat antisipatif karena program belum benar-benar menjangkau wilayahnya pada saat wawancara dilakukan, sehingga pernyataannya merupakan proyeksi sikap, bukan pengalaman pelaksanaan yang telah dijalani. Ketiga, respons positif informan WP2 sebagian terbentuk setelah

penjelasan program disampaikan langsung oleh peneliti dalam sesi wawancara yang sama, sehingga berisiko mengandung *interviewer effect*.

5.2.2 Saran

Bagi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, disarankan untuk melakukan audit jangkauan sosialisasi program secara berjenjang sebelum memperluas implementasi ke tahap Sengkuyung 2026, memastikan informasi program benar-benar tersampaikan hingga ke RT/RW dan wajib pajak, tidak berhenti pada *level* kabupaten/kota. BAPENDA juga disarankan mengevaluasi kesesuaian metode *door-to-door* dengan karakteristik wajib pajak perkotaan yang memiliki keterbatasan waktu, mempertimbangkan kanal komunikasi yang lebih beragam, serta meninjau ulang gaya komunikasi promosi (seperti narasi diskon/Opsen) agar lebih transparan demi menjaga kepercayaan publik.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah dan variasi lokasi informan, khususnya melibatkan RT/RW dan wajib pajak yang telah benar-benar mengalami pelaksanaan Program Sengkuyung secara langsung, sehingga data yang diperoleh bersifat reflektif dan bukan antisipatif. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis dengan menambahkan kerangka efektivitas program (misalnya Riant Nugroho) atau model kepatuhan pajak (misalnya Slippery Slope Model) untuk melengkapi temuan implementasi yang telah dihasilkan penelitian ini.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat proposisi Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur dari kejelasan standar dan ketersediaan sumber daya semata, melainkan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi antarorganisasi hingga unit pelaksana terkecil. Temuan tentang kesenjangan kesadaran program di tingkat RT/RW dan wajib pajak menjadi kontribusi empiris baru bagi literatur implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya pada konteks program inovasi kolaboratif berjenjang yang melibatkan banyak aktor pemerintahan.

5.3.2 Implikasi Praktis

Bagi BAPENDA, temuan ini memberikan dasar evaluasi konkret untuk memperkuat mekanisme distribusi informasi sebelum perluasan program lebih lanjut. Bagi pemerintah kabupaten/kota dan perangkat wilayah (kecamatan, kelurahan, RT/RW), temuan ini menegaskan perlunya kejelasan peran dan pembekalan yang memadai apabila benar-benar dilibatkan sebagai mitra pelaksana program perpajakan daerah. Bagi masyarakat wajib pajak, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komunikasi yang humanis, transparan, dan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi riil, sebagai prasyarat untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.